

## BAB V

### KESIMPULAN

Keentingan nasional suatu negara adalah sesuatu yang menguntungkan negara tersebut. Namun masing-masing individu atau kelompok memiliki versi sendiri mengenai apa yang menguntungkan mereka. Di dalam kasus uji coba nuklir di Korea Utara, kepentingan nasional lebih kepada apa yang dikatakan para penguasa negara komunis sosialis tersebut. Jadi akhirnya, segala bentuk pencapaian kepentingan nasional Korea Utara tidak lepas dari apapun yang diinginkan pemimpin negara tersebut. Sehingga kepentingan nasional diwujudkan melalui kebijakan nasional yang mencerminkan kepribadian sang pemimpin

Pada tahun 2009, Korea Utara memutuskan kebijakan untuk melanjutkan program pengembangan senjata nuklir dan melanggar resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB. Ada beberapa alasan pokok yang menjadi bahan analisa penulis dalam menjelaskan mengapa Korea Utara melanjutkan program nuklirnya pada tahun 2009, yaitu dilihat dari sisi politik dalam negeri, aspek militer, aspek ekonomi dan konteks internasional.

Aspek dalam negeri Korea Utara sangat dipengaruhi oleh ideologi Juche atau ideologi yang bergantung pada diri sendiri. Namun pada dewasa ini rejim bergantung pada diri sendiri tidak berjalan dengan baik dan menimbulkan kebijakan pemerintah yang labil. Kebijakan pemerintah yang labil menyebabkan ketegangan dalam negeri Korea Utara dan juga berbagai masalah hak asasi manusia

lainnya. Berbagai masalah tersebut menjadi pemikiran tersendiri bagi Kim Jong Il sehingga ia terserang penyakit stroke. Maka mau tidak mau ia harus mencari pengganti dirinya dan mempersiapkan pengganti diirnya secara cepat. Pengganti Kim Jong Il berikutnya merujuk pada anak bungsu Kim Jong Il yang bernama Kim Jong Un. Namun Kim Jong Il tidak sempat mempersiapkan Kim Jong Un sedangkan kondisi dalam negeri terjadi perebutan kekuasaan.

Aspek ekonomi Korea Utara melemah setelah adanya Resolusi 1718, karena ternyata *pay off* atau bantuan bahan bakar tidaklah sesuai seperti yang ditetapkan sebelumnya. Walaupun Korea Utara sudah mematikan semua fasilitas nuklirnya, namun ternyata bantuan bahan bakar yang senilai 950.000 ton tidak diberikan oleh PBB. Bantuan bahan bakar tidak diberikan karena Amerika Serikat masih tidak percaya bahwa Korea Utara akan menghentikan semua program nuklirnya. Dan menganggap bahwa Korea Utara seharusnya tidak mendapat imbalan, karena Korea Utara telah berbuat sesuatu yang salah (tidak ada imbalan bagi yang salah).

Aspek militer secara langsung melemah secara drastis akibat dari pelarangan semua kepemilikan persenjataan konvensional Korea Utara. Dan akan secara pasti melemahkan kekuatan tunggal negara komunis tersebut yaitu kemampuan militer. Kedaulatan negara menjadi terancam.

Setelah dilaksanakannya penutupan reaktor nuklir dan penyerahan senjata konvensional Korea Utara yang tercantum di dalam Resolusi 1718, terlihat bahwa Amerika Serikat semakin menguatkan posisinya di Korea

Selatan. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Amerika Serikat ingin menjatuhkan rejim komunis yang berkuasa di Korea Utara. Selain itu, Amerika Serikat juga ingin menguatkan posisi di wilayah ini menakut-nakuti Cina bahwa Amerika Serikat tidak segan untuk mengobarkan perang di tetangga dekat dan sekutu Cina seperti Korea Utara kapan saja. Dengan tujuan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memeras Cina supaya mendapatkan kompromi di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan juga masalah politik regional. Maka Cina dapat dikendalikan dan dibatasi ruang geraknya pada perbatasannya saja.

Dengan melihat berbagai kondisi tersebut, maka Korea Utara melalui pemimpin tertingginya Kim Jong Il mengambil kebijakan dengan melanjutkan program nuklir Korea Utara dengan maksud ingin membuktikan eksistensinya di mata internasional sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Korea Utara bukan negara kecil dan memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan